BULLETIN
Menuju Good Governance & Clean Government
ISSN 1412 - 6536

Swara Diklat

Pengarusatamaan Gender Dalam Pembangunan di Jawa Timur

Edisi 35 2010

FOKUS WARTA KELILING | INFOTEK | RESENSI | ASIAN LANGUAGE | KLIK DIKLAT

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung
H. Soekarwo
Gubernur Jawa Timur

Penanggung Jawab
SAIFUL RACHMAN

Pimpinan Redaksi
Budi Santosa

Sekertaris Redaksi
R. Adi Kamel

Dewan Redaksi
Penjabat Struktural dan Fungsional

Editing
Sudarto Suwarto dan Esti Sri Rahayu

Fotografer
Moh. Basori

www.badan diklatjatim.go.id

Alamat Redaksi
Jl. Balongsari Tama, Tandes - Surabaya
Telp : 031 - 7412278
Fax : 031 - 7412279

Coretan Redaksi

Selamat berjumpa lagi di Buletin "Swara Diklat " yang kali ini sudah memasuki Edisi ke-35. Ada suatu hal yang wajar apabila ada beberapa kekawatiran kecil yang menghantui kami selaku Tim Redaksi, antara lain kekawatiran akan kebosanan yang mungkin saja dialami para pembaca dan yang lebih krusial adalah jangan-jangan kami kehabisan ide di masa-masa mendatang dalam menerbitkan Buletin Swara Diklat ini.

Namun syukurlah roda terus berputar dan perubahan tidak pernah berhenti menggelinding. Ada saja fenomena, issue dan hal-hal baru yang hadir melingkupi dan mewarnai lingkungan, masyarakat, bangsa dan dunia yang kita pijak. Tentu saja, kami diuntungkan yakni dapat menggali kreativitas lebih dalam dan lebih luas.

Dalam Edisi-35 ini Buletin Swara diklat mengambil tema Pengarusatamaan Gender Dalam Pembangunan di Jawa Timur. Seperti diketahui bahwa perkembangan pola pikir tentang perempuan sebagai obyek pembangunan perlu diubah melalui upaya pembangunan pemberdayaan perempuan dengan menempatkan perempuan sebagai subyek. Perbaikan kondisi perempuan baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, politik dll diharapkan akan meningkatkan posisi tawar perempuan dalam berkiprah, berperan, berkontribusi setara dengan laki-laki.

Segmen rutin tetap kami tampilkan sebagaimana biasanya sesuai dengan contens yang sudah ada di Edisi Swara Diklat sebelumnya. Akhirnya kami dari Tim Penerbit Buletin Swara Diklat mengucapkan selamat membaca dan menikmati semoga memberi manfaat. Amin

Selamat membaca..!!

Edisi 35 2010

CONTENT

Editorial
Gender Dan Kemajuan Bangsa

Fokus
- Implementasi Pengarustamaan Gender di Jatim
- Peran Perempuan Dalam Persepektif Perekonomian Keluarga
- Perkembangan Perempuan Dalam Pembangunan

Renungan
Kesetaraan Gender "Memaknai Keadilan dari Persepektif Islam"

Warta Keliling
- Dalam Negri : Pusdiklat Perdagangan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia
- Luar Nergi : Reformasi Pegawai Negri dan Kepemerintahan yang Baik di Thailand

Woman Corner
Peran Perempuan Dalam bidang pembangunan ekonomi

Resensi
- Design your Life
- Merajut Kembali Ke- Indonesiaan Kita

Klik Diklat
Belajar Matematika Siapa Takut

Psikologi Corner
Pengaruh Gender, Tekanan Ketataan, Dan Kompleksitas Tugas Terhadap Tugas Audit Judgment

Pojok Telematika
Web Site Badan Diklat Dan Informasi Peserta Diklat

Redaksi menerima tulisan berupa berita, artikel dan hasil penelitian yang sesuai dengan motto **Swara Diklat**. *Redaksi berhak melakukan penyuntingan sesuai kebutuhan dengan tanpa mempengaruhi isi tulisan*

ALAMAT REDAKSI

Jl. Balongsari Tama, Tandes - Surabaya
Telp. : 031 - 7412278
Fax. : 031 - 7412279

Peran Perempuan Dalam Perspektif Perekonomian Keluarga

Oleh: Dr. S u k e s i, MM
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo
greenpct@yahoo.com

Pendahuluan

Perempuan bukan lagi konco wingking, namun perempuan sebagai Saka Sakti Keluarga, baik pada sektor domestik maupun pada sektor publik. Perubahan peran dari sektor domestik ke sektor publik akan membuka kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang memungkinkan untuk melakukan pilihan-pilihan dalam menelusuri jalan kehidupan (Nunuk P. Murniarti et. al, 2001: 71-74). Hal ini karena, posisi dan kedudukan perempuan di dalam masyarakat semakin kuat dengan dikeluarkannya berbagai regulasi yang mengatur penempatan perempuan sejajar dengan kaum laki-laki. Di Indonesia regulasi mengenai gender ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Kemudian untuk mengimplementasikan UU tersebut, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional, dan dalam pelaksanakaan operasionalnya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Nomor 132 Tahun 2003 (Kepmendagri 132) tentang Pedoman

Umum Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah.

Gender adalah konsep yang mengacu kepada peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-

laki. Sedangkan PUG adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama

Gender adalah konsep yang mengacu kepada peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki.

antara perempuan dan laki-laki, dalam Mimbar DEPDAGRI. Era keterbukaan tersebut membawa angin segar bagi kalangan perempuan untuk ikut andil mengelola usaha sebagai pilihan demokratis ditengah alam kehidupan yang kian demokratis pula. Dengan demikian kaum perempuan dan para ibu dapat ikut serta membangun keluarga, lingkungan serta mengembangkan sifat dan jiwa kewirausahaan dengan ikut serta dalam gerakan pemberdayaan ekonomi keluarga. Semangat tinggi dimiliki para perempuan untuk berkiprah di sektor publik demi menegakkan ekonomi keluarga, sebaliknya jika melihat dari diri mereka justru memiliki semangat tinggi, tidak kenal lelah, ulet, rajin, dll. Demi mendongkrak ekonomi keluarga.

Sehingga dalam hal ini, dengan adanya regulasi mengenai gender yang diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menjadikan perempuan bukan lagi konco wingking, namun sebaliknya perempuan sebagai saka sakti keluarga. Makna simbolik SAKA berarti tiang atau tonggak, sedangkan SAKTI berarti keampuhan, kekuatan atau ilmu andalan yang tentunya ditujukan pada peran perempuan untuk kemaslahatan seluruh masyarakat lingkungan internal dan ekternal.

Bergesernya perubahan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat menjadikan perempuan memiliki tanggungjawab tidak hanya pada sektor domestik tetapi juga pada sektor publik. Hal ini dipertajam dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja perempuan yang kemudian memunculkan peran ganda bagi perempuan itu sendiri.

Perspektif Perekonomian Keluarga

Analisis alternatif mengenai peran perempuan dapat dilihat dari tiga perspektif dalam kaitannya dengan posisinya sebagai manager rumah tangga dan partisipan pembangunan atau pekerja pencari nafkah, Hubeis dalam Toety Herati Noerhadi (1990: 152). Tiga perspektif yang dimaksud meliputi:

a. Peran Tradisi;

Sering juga disebut peran domestik menjadi urusan perempuan, semua pekerjaan rumah dari membersihkan rumah, memasak, merawat/ mengasuh anak dan masih banyak pernik-perniknya yang berkaitan dengan rumah tangga. Perempuan sebaiknya di rumah saja agar semua urusan menjadi terselesaikan dengan baik.

b. Peran Transisi;

Banyak terjadi khususnya di daerah pertanian, perempuan sudah terbiasa bekerja di usaha keluarga.

c. Peran Kontemporer;

Jika seorang perempuan hanya memiliki peran di luar rumah tangga pada saat itu masih disebut peran kontemporer atau perempuan karir. Biasanya mereka memilih hidup tidak menikah dan mencari nafkah sendiri, ini

terdapat di kota-kota besar. Dalam Argyo Perempuan dan Pasar Kerja Analisa Mengenai Keterlibatan Perempuan dalam Pasar Kerja

Perspektif perempuan sebagai tulang punggung keluarga ini meyakinkan bahwa kaum perempuan adalah asset pembangunan yang belum banyak dimanfaatkan. Atas dasar paradigma ini, maka kaum perempuan perlu dimanfaatkan potensinya secara penuh dengan melibatkan kaum perempuan melalui ekspansi. Woman in Development Approach (WDA) diperkenalkan oleh United States Agency for International Development (USAID) dengan pemikiran dasar bahwa perempuan merupakan "sumber daya yang belum dimanfaatkan" yang dapat memberikan sumbangan ekonomi dalam pembangunan (Fakih, 1996; Ihromi Ed., 1995: 208). Pemanfaatan Sumber Daya Manusia perempuan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi juga dapat dicermati dari strategi pengerahan tenaga kerja perempuan untuk memasuki pasar kerja internasional.

Dalam hal ini, perempuan harus mempunyai kemampuan untuk melihat potensi yang ada, peluang-peluang yang mungkin dapat dikembangkan, sehingga dengan mudah peluang tersebut untuk diperluas menjadi jaringan yang lebih kuat. Besarnya peran perempuan untuk memanfaatkan keunggulan-keunggulan merupakan pendekatan praktis yang dapat dilakukan seperti di saat kondisi ekonomi keluarga memaksa perempuan memainkan peranannya sebagai penyangga ekonomi kelurga. Bahkan, beberapa kasus usaha ekonomi perempuan yang awalnya merupakan usaha sampingan, kini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, itulah hebatnya keunggulan perempuan yang ulet, tlaten, penuh kesabaran dan tidak cepat putus asa. Keuntungan lain adalah perempuan umumnya mampu mengelola arus keluar-masuk uang agar dapat menyisihkan hasil usahanya sedikit demi sedikit untuk keperluan lain. Kesabaran dan kegigihan dalam mengelola usahanya telah mendorong keberhasilan perempuan dalam mencari tambahan penghasilan keluarga. Kiprah perempuan dalam perekonomian keluarga dan nasional menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan secara keseluruhan. Seiring dengan bertambahnya pendapatan perempuan atau akses perempuan terhadap sumber-sumberdaya ekonomi, maka kemampuan dan kesempatan mereka bernegosiasi dalam rumah tanggapun meningkat. Jadi, perempuan pada umumnya kalau diberi kesempatan, dan mendapat pembinaan dengan baik, akan mampu menjadi Sumber Daya Manusia yang unggul.

Seperti misalnya, melalui kegiatan Yayasan Damandiri sekitar 18,7 juta keluarga, yang

diwakili oleh ibu-ibu di lingkungan keluarga ikut proses pembelajaran, berusaha, dan berkarya dalam pemberdayaan ekonomi keluarga yang mengagumkan. Dari sekitar 18,7 juta keluarga, menurut laporan Kepala BKKBN, sekitar 18,3 juta keluarga di antaranya bisa dianggap maju. Karena, ibu-ibu berani mengambil resiko dan mempunyai inisiatif membuka usaha dengan modal pinjaman. Sebetulnya banyak program yang telah dberikan pemerintah berkenaan dengan pemberdayaan ekonomi keluarga. Hampir di seluruh dinas/instansi mengalokasikan program sasaran pada PRO POOR, PRO GROWTH, dan PRO JOB.

Pemberdayaan ekonomi keluarga memuat pemantauan pemerintah tentang potensi ekonomi keluarga terdapat lima hal pokok yang perlu dilakukan:

(1) Bantuan dana sebagai modal usaha;
(2) Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi keluarga;
(3) Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang, dan jasa keluarga;
(4) Pelatihan bagi para aparat dan keluarga; dan
(5) Penguatan kelembagaan sosial ekonomi keluarga.

Penutup

Peran perempuan dalam perekonomian keluarga dapat dilihat dalam kaitannya dengan posisinya sebagai manager rumah tangga dan partisipan pembangunan atau pekerja pencari nafkah. Sebutan perempuan bukan lagi konco wingking, namun sebaliknya perempuan sebagai saka sakti keluarga adalah lebih tepat dan sangat terhormat. Keunggulan berkiprah bagi perempuan lebih luwes dan lebih mudah menyesuaikan diri baik pada sektor domestik maupun pada sektor publik.

Besarnya peran perempuan untuk memanfaatkan keunggulan-keunggulan merupakan pendekatan praktis yang dapat dilakukan seperti di saat kondisi ekonomi keluarga memaksa perempuan memainkan peranannya sebagai penyangga ekonomi kelurga. Bahkan, beberapa kasus usaha ekonomi perempuan yang awalnya merupakan usaha sampingan, kini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Perempuan pengusaha juga cenderung untuk melakukan bisnis dan urusan rumah tangga bersama-sama. Mungkin ini merupakan hal yang logis sebagai konsekuensi sebagai seorang ibu tentu menghendaki adanya keseimbangan antara pekerjaan di rumah dan di perusahaan. Hingga saat ini kaum laki-laki belum menyadari dan membuka diri atas adanya peran ganda yang ditanggung pihak perempuan (istri). Padahal untuk urusan mencari nafkah bagi keluarga, para kaum perempuan dengan segala upaya dan keterbatasan ikut menanggungnya.